

**PORTOFOLIO
MATA KULIAH STUDI SOSIAL EKONOMI DAN
KEWIRAUSAHAAN**

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.

Dr. Nikki Tri Sakung, S.Pd., M.Pd.



Oleh:

**DIAH RACHMAWATI SYUKRI
NPM 2523031003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga laporan portofolio yang berjudul "**Sociopreneurship: Kewirausahaan Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat**" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk upaya penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai kewirausahaan sosial sebagai pendekatan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Laporan portofolio ini memuat kajian dan analisis mengenai berbagai aspek sociopreneurship, mulai dari konsep dasar, model pengembangan, implementasi program, hingga praktik-praktik kewirausahaan sosial yang berkembang di masyarakat. Pembahasan dalam laporan ini mencakup inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, kewirausahaan berbasis nilai sosial, pengukuran dampak sosial, serta perkembangan ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia. Setiap materi disajikan dengan mengaitkan konsep teoretis dan berbagai hasil penelitian yang relevan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, rekan-rekan mahasiswa, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa motivasi, masukan, maupun referensi yang mendukung penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan portofolio ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumber informasi bagi pembaca dalam memahami peran penting sociopreneurship sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sociopreneurship atau kewirausahaan sosial merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan misi sosial untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, sociopreneurship menempatkan dampak sosial sebagai tujuan utama, sementara keberhasilan ekonomi menjadi sarana yang memungkinkan misi sosial tersebut berjalan secara berkelanjutan. Pendekatan ini semakin relevan di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi Indonesia, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan marginalisasi kelompok rentan.

Perkembangan sociopreneurship di Indonesia didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat sipil, dukungan ekosistem inkubasi bisnis sosial, serta pergeseran paradigma pembangunan yang semakin menekankan pentingnya model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Berbagai wirausahawan sosial Indonesia telah berhasil mengembangkan model bisnis yang inovatif untuk menyelesaikan masalah sosial, mulai dari pemberdayaan petani kecil, pendidikan komunitas terpinggirkan, sanitasi masyarakat miskin, hingga inklusi ekonomi penyandang disabilitas.

Melalui penyusunan portofolio ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam 20 topik penting yang berkaitan dengan sociopreneurship dan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Setiap topik dianalisis menggunakan kerangka teori yang relevan dan dikaitkan dengan hasil penelitian terkini, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai dinamika kewirausahaan sosial di Indonesia dan global.

1.2. Tujuan Penyusunan Portofolio

- Menganalisis konsep, model, dan praktik sociopreneurship yang berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.
- Mengkaji secara kritis kaitan antara teori kewirausahaan sosial dengan praktik pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
- Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dalam pengembangan ekosistem sociopreneurship di Indonesia.

1.3. Manfaat Penyusunan Portofolio

- Menambah wawasan tentang peran sociopreneurship dalam mendorong perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- Menjadi referensi pembelajaran studi sosial ekonomi dan kewirausahaan berbasis analisis mendalam.
- Melatih kemampuan analisis kritis mahasiswa dalam mengkaji permasalahan sociopreneurship dan dampaknya bagi masyarakat.

BAB II. PEMBAHASAN

PORTOFOLIO 1

KONSEP DASAR SOCIOPRENEURSHIP DAN PERBEDAANNYA DENGAN KEWIRAUSAHAAN KONVENSIONAL

Deskripsi

Sociopreneurship atau kewirausahaan sosial merupakan suatu bentuk kewirausahaan yang mengutamakan penciptaan nilai sosial sebagai tujuan utama, sementara keberhasilan finansial diperlakukan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memperluas dampak sosial yang dihasilkan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Bill Drayton, pendiri Ashoka Foundation, yang pada tahun 1980-an mengidentifikasi individu-individu yang menggunakan prinsip bisnis untuk memecahkan masalah sosial secara inovatif dan sistematis. Sociopreneurship berbeda secara fundamental dari kewirausahaan konvensional dalam hal orientasi tujuan, pengukuran keberhasilan, dan distribusi keuntungan. Wirausaha sosial mengukur keberhasilan tidak hanya dari profitabilitas, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, lingkungan, atau kelompok yang diuntungkan. Berbeda pula dengan filantropi murni, sociopreneurship berupaya menciptakan model bisnis yang finansial viable dan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi.

Analisis

Perbedaan mendasar antara sociopreneurship dengan kewirausahaan konvensional terletak pada struktur nilai yang mendasarinya. Wirausaha konvensional beroperasi dalam logika value creation for shareholders, di mana keuntungan finansial menjadi ukuran keberhasilan utama. Sebaliknya, wirausaha sosial beroperasi dalam logika value creation for stakeholders yang lebih luas, mencakup masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Dalam praktiknya, sociopreneurship sering menghadapi tension antara imperatif sosial dan imperatif komersial. Kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan finansial kadang berbenturan dengan misi sosial untuk melayani kelompok paling rentan yang secara komersial kurang menguntungkan. Kemampuan mengelola ketegangan ini—yang sering disebut sebagai social-commercial hybrid—merupakan kompetensi inti yang membedakan wirausaha sosial yang berhasil dari yang gagal.

Kaitan Dengan Teori

Konsep sociopreneurship dapat dianalisis melalui kerangka teori yang dikemukakan oleh Dees (1998) yang mendefinisikan wirausaha sosial sebagai agen perubahan sosial yang memiliki misi sosial yang jelas, mengenali dan mengejar peluang yang mendukung misi tersebut, terlibat dalam proses inovasi berkelanjutan, bertindak berani tanpa terbatas sumber daya yang dimiliki saat ini, dan memiliki akuntabilitas tinggi terhadap konstituennya. Teori nilai hibrida dari Battilana dan Dorado (2010) juga relevan dalam menjelaskan mengapa sociopreneurship memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda dari organisasi murni bisnis atau murni sosial. Mereka menjelaskan bahwa organisasi hibrida harus mampu mengembangkan identitas bersama yang mengintegrasikan logika komersial dan sosial, bukan memilih salah satunya.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Austin, Stevenson, dan Wei-Skillern (2006) yang diterbitkan dalam *Entrepreneurship Theory and Practice* mengidentifikasi empat dimensi kunci yang membedakan sociopreneurship dari kewirausahaan konvensional: kegagalan pasar yang menjadi fokus, misi yang menjadi penggerak, pengukuran kinerja, dan mobilisasi sumber daya. Studi tersebut menemukan bahwa wirausaha sosial lebih sering beroperasi di arena di mana pasar gagal menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, menjadikan mereka sebagai pelengkap yang esensial bagi mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Penelitian Bacq dan Janssen (2011) yang melakukan tinjauan sistematis terhadap 290 artikel tentang kewirausahaan sosial menemukan bahwa meskipun definisi sociopreneurship masih beragam, terdapat konsensus mengenai tiga elemen utama: orientasi sosial yang dominan, inovasi sebagai mekanisme perubahan, dan keberlanjutan finansial sebagai prasyarat.

Kesimpulan

Sociopreneurship merupakan paradigma kewirausahaan yang memadukan kreativitas bisnis dengan kepekaan sosial untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang perbedaannya dengan kewirausahaan konvensional sangat penting bagi para calon wirausahawan sosial agar dapat merancang model bisnis yang mampu menjawab tantangan sosial sekaligus memastikan keberlanjutan operasional. Dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi Indonesia, sociopreneurship semakin relevan sebagai pendekatan inovatif yang melengkapi kebijakan pemerintah dan filantropi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

PORTOFOLIO 2

MODEL BISNIS SOSIAL DAN STRATEGI PENCIPTAAN NILAI GANDA (DOUBLE BOTTOM LINE)

Deskripsi

Model bisnis sosial merupakan kerangka operasional yang dirancang untuk secara simultan menghasilkan nilai ekonomi dan nilai sosial, suatu konsep yang dikenal sebagai double bottom line atau bahkan triple bottom line ketika dimensi lingkungan turut dimasukkan. Berbeda dengan model bisnis konvensional yang dioptimalkan untuk memaksimalkan keuntungan finansial bagi pemegang saham, model bisnis sosial dirancang untuk memaksimalkan dampak sosial positif sekaligus menjamin keberlanjutan finansial organisasi. Di Indonesia, berbagai wirausahawan sosial telah mengembangkan model bisnis yang inovatif dan beragam, mulai dari model cross-subsidy di mana konsumen mampu mensubsidi layanan bagi konsumen kurang mampu, model impact investing yang menarik modal dari investor yang menginginkan return sosial dan finansial, hingga model koperasi yang mendistribusikan manfaat secara kolektif kepada anggota.

Analisis

Pengembangan model bisnis sosial yang efektif memerlukan analisis mendalam tentang value proposition yang ditawarkan kepada dua jenis pelanggan: beneficiaries sosial yang menerima dampak sosial positif, dan customers komersial yang membayar untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Ketika kedua kelompok ini berbeda misalnya pada model pay-it-forward di mana pelanggan mampu membayar lebih untuk mensubsidi layanan bagi kelompok tidak mampu, maka diperlukan strategi pemasaran dan segmentasi yang cermat. Tantangan utama pengembangan model bisnis sosial adalah memastikan keberlanjutan finansial tanpa mengorbankan misi sosial. Misi drift atau pergeseran misi terjadi ketika tekanan komersial memaksa organisasi untuk mengalihkan fokus dari kelompok sasaran yang paling membutuhkan kepada kelompok yang secara komersial lebih menguntungkan.

Kaitan Dengan Teori

Model bisnis sosial dapat dianalisis menggunakan kerangka Business Model Canvas yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur (2010), yang kemudian diadaptasi oleh Yunus dkk. (2010) menjadi Social Business Model Canvas. Adaptasi ini menambahkan elemen social profit equation yang mengukur manfaat sosial yang dihasilkan dikurangi biaya sosial yang ditimbulkan, sebagai padanan dari profit equation konvensional. Teori nilai bersama (shared value) dari Porter dan Kramer (2011) memberikan perspektif yang komplementer dengan menjelaskan bahwa bisnis yang berhasil mengintegrasikan penciptaan nilai ekonomi dengan nilai sosial justru memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang yang lebih kuat dibandingkan bisnis yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Yunus (2010) tentang Grameen Bank dan berbagai social business yang dikembangkannya di Bangladesh menunjukkan bahwa model bisnis sosial yang dirancang

dengan baik dapat mencapai keberlanjutan finansial penuh sekaligus memberikan dampak sosial yang transformatif bagi jutaan orang. Grameen Bank, yang memberikan kredit mikro kepada masyarakat termiskin di Bangladesh, telah membuktikan bahwa melayani kelompok yang selama ini diabaikan pasar dapat menjadi model bisnis yang viable secara finansial. Penelitian Wilson dan Post (2013) terhadap 28 social enterprise di Amerika Serikat dan Eropa mengidentifikasi enam komponen kritis model bisnis sosial yang berhasil: kejelasan misi sosial, identifikasi beneficiaries yang tepat, proposisi nilai yang jelas bagi semua stakeholders, strategi pendapatan yang terdiversifikasi, mekanisme tata kelola yang memastikan akuntabilitas sosial, dan sistem pengukuran dampak yang terstruktur.

Kesimpulan

Model bisnis sosial yang efektif merupakan fondasi keberhasilan sociopreneurship dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Kemampuan untuk merancang model bisnis yang mengintegrasikan penciptaan nilai ekonomi dan sosial secara sinergis, bukan sebagai trade-off, merupakan kompetensi inti wirausaha sosial. Di Indonesia, pengembangan ekosistem yang mendukung pembelajaran dan pertukaran praktik terbaik model bisnis sosial sangat diperlukan agar lebih banyak wirausahawan sosial dapat mengembangkan model yang berdampak besar dan berkelanjutan.

PORTOFOLIO 3

INOVASI SOSIAL DAN PERANNYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN

Deskripsi

Inovasi sosial merujuk pada gagasan, model, dan layanan baru yang secara simultan memenuhi kebutuhan sosial dan menciptakan hubungan sosial serta kolaborasi baru yang lebih baik. Berbeda dengan inovasi teknologi yang terutama berfokus pada efisiensi dan produktivitas ekonomi, inovasi sosial secara eksplisit menargetkan perubahan pada sistem sosial yang menghasilkan kesenjangan dan kemiskinan. Di Indonesia, berbagai inovasi sosial telah berkembang untuk mengatasi kemiskinan multidimensional, mulai dari model tabungan komunitas berbasis digital, sistem pertanian kontrak yang memberdayakan petani kecil, platform marketplace yang menghubungkan pengrajin dengan pasar global, hingga model layanan kesehatan berbasis komunitas yang menjangkau daerah terpencil. Inovasi sosial dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk wirausaha sosial individual, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, perusahaan swasta melalui program CSR, atau bahkan dari komunitas yang terdampak sendiri.

Analisis

Proses inovasi sosial yang efektif dalam mengatasi kemiskinan umumnya bergerak melalui beberapa tahapan: identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, pengembangan ide solusi, prototyping dan uji coba skala kecil, evaluasi dampak, penyesuaian model berdasarkan pembelajaran, dan akhirnya penskalaan dan replikasi model yang berhasil. Kunci keberhasilan inovasi sosial dalam mengatasi kemiskinan adalah kemampuannya untuk memahami secara mendalam dinamika kemiskinan dari perspektif orang miskin sendiri—pendekatan yang dikenal sebagai human-centered design. Inovasi yang dikembangkan tanpa melibatkan komunitas sasaran seringkali gagal bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena tidak relevan dengan kebutuhan, budaya, atau kapasitas nyata masyarakat yang ingin dibantu.

Kaitan Dengan Teori

Inovasi sosial dapat dianalisis melalui kerangka teori yang dikembangkan oleh Mulgan dkk. (2007) di NESTA yang mendefinisikannya sebagai aktivitas dan layanan inovatif yang termotivasi oleh tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan yang terutama dikembangkan serta disebarluaskan melalui organisasi yang tujuan utamanya bersifat sosial. Teori kemiskinan sebagai kurangnya kapabilitas dari Amartya Sen (1999) memberikan kerangka yang kuat untuk memahami mengapa inovasi sosial yang efektif perlu menyasar peningkatan kemampuan substantif masyarakat miskin, bukan sekadar peningkatan pendapatan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mereka nilai.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Phills, Deiglmeier, dan Miller (2008) yang diterbitkan dalam Stanford Social Innovation Review mengkaji lebih dari 50 kasus inovasi sosial global dan menemukan bahwa inovasi sosial yang paling berdampak adalah yang berhasil mengubah sistem, bukan sekadar memberikan solusi parsial bagi individu. Mereka mengidentifikasi

bahwa inovasi sosial terbaik bekerja pada multiple leverage points dalam sistem sosial secara bersamaan. Penelitian Bornstein (2007) dalam bukunya *How to Change the World* mendokumentasikan puluhan wirausahawan sosial yang berhasil mengembangkan inovasi yang mengatasi kemiskinan secara sistemik di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Studi tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan inovasi sosial dalam mengatasi kemiskinan sangat ditentukan oleh komitmen jangka panjang, kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal, dan jaringan kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan setempat.

Kesimpulan

Inovasi sosial merupakan komponen esensial dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan karena mampu menghadirkan solusi yang lebih kreatif, efisien, dan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat dibandingkan program konvensional. Di Indonesia, ekosistem inovasi sosial yang berkembang perlu mendapatkan dukungan yang lebih sistematis dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis agar inovasi yang berhasil dapat diskalakan dan berdampak bagi jutaan orang yang masih hidup dalam kemiskinan multidimensional.

PORTOFOLIO 4

PERAN WIRAUSAHA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

Deskripsi

Pemberdayaan perempuan melalui sociopreneurship merupakan salah satu area yang paling strategis dan berdampak luas dalam pembangunan sosial ekonomi. Perempuan di Indonesia, terutama di pedesaan dan wilayah terpinggirkan, masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses peluang ekonomi, termasuk keterbatasan akses pembiayaan, norma sosial yang membatasi mobilitas, beban kerja domestik yang tidak proporsional, dan rendahnya kepemilikan aset. Wirausaha sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan telah mengembangkan berbagai model inovatif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk koperasi simpan pinjam perempuan, platform e-commerce untuk pengrajin perempuan, program pelatihan keterampilan digital, dan model usaha komunitas berbasis rumah yang memungkinkan perempuan bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik.

Analisis

Dampak sociopreneurship terhadap pemberdayaan perempuan bersifat multidimensional dan melampaui sekadar peningkatan pendapatan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan mengembangkan keterampilan wirausaha, mereka juga mengalami peningkatan dalam kepercayaan diri, kemampuan pengambilan keputusan, dan posisi tawar dalam rumah tangga serta komunitas. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan memiliki multiplier effect yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan laki-laki, karena perempuan cenderung mengalokasikan lebih besar proporsi pendapatannya untuk pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan investasi jangka panjang. Tantangan yang dihadapi wirausaha sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan adalah resistensi budaya, norma gender yang mengakibatkan mobilitas terbatas, serta sulitnya mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam ekonomi.

Kaitan Dengan Teori

Pemberdayaan perempuan melalui sociopreneurship dapat dianalisis menggunakan teori pemberdayaan dari Kabeer (1999) yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai perluasan kemampuan seseorang untuk membuat pilihan hidup yang strategis dalam konteks di mana kemampuan tersebut sebelumnya ditolak. Kabeer mengidentifikasi tiga dimensi pemberdayaan: resources (akses terhadap sumber daya material, manusia, dan sosial), agency (kemampuan untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk membuat keputusan), dan achievements (pencapaian yang merupakan hasil dari proses agency). Teori gender dan pembangunan dari Moser (1993) juga relevan, yang membedakan antara kebutuhan gender praktis (terkait kondisi hidup) dan kebutuhan gender strategis (terkait posisi dan peran gender). Sociopreneurship yang paling transformatif adalah yang mampu menjawab kebutuhan gender strategis, bukan sekadar kebutuhan praktis.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Mayoux (2001) tentang dampak program kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan di berbagai negara berkembang menemukan bahwa akses terhadap modal saja tidak cukup untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi diperlukan kombinasi dengan pelatihan kewirausahaan, jaringan sosial yang mendukung, dan perubahan norma gender dalam komunitas. Penelitian tersebut memperingatkan risiko bahwa program kredit mikro dapat justru meningkatkan beban kerja perempuan tanpa meningkatkan otonomi mereka jika tidak disertai dengan intervensi yang menangani ketidaksetaraan gender secara struktural. Penelitian Datta dan Gailey (2012) tentang Grameen Bank di Bangladesh menemukan bahwa kombinasi antara akses kredit, pelatihan kewirausahaan, dan sistem kelompok solidaritas yang dikembangkan oleh Grameen Bank berhasil meningkatkan agensi perempuan secara signifikan, tidak hanya dalam keputusan ekonomi tetapi juga dalam keputusan rumah tangga terkait pendidikan anak, kesehatan, dan perencanaan keluarga.

Kesimpulan

Sociopreneurship yang berfokus pada pemberdayaan perempuan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sosial ekonomi yang memberikan return berlipat bagi seluruh keluarga dan komunitas. Dengan merancang model bisnis sosial yang secara spesifik mengatasi hambatan gender dan memperkuat agensi perempuan, wirausahawan sosial dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dan mendalam. Dukungan kebijakan yang berperspektif gender, program penguatan kapasitas wirausahawan sosial perempuan, dan perubahan norma sosial melalui edukasi komunitas merupakan prasyarat keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui jalur sociopreneurship.

PORTOFOLIO 5

PENGUKURAN DAMPAK SOSIAL (SOCIAL IMPACT MEASUREMENT) DALAM SOCIOPRENEURSHIP

Deskripsi

Pengukuran dampak sosial merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan perubahan sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas suatu organisasi atau program. Bagi wirausahawan sosial, kemampuan mengukur dampak sosial secara kredibel bukan sekadar kewajiban akuntabilitas kepada donor dan investor, tetapi juga merupakan alat manajemen esensial untuk memahami efektivitas intervensi, mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan terus memperbaiki model bisnis sosial. Berbagai metodologi pengukuran dampak sosial telah dikembangkan, termasuk Social Return on Investment (SROI) yang menghitung nilai ekonomi dari dampak sosial yang dihasilkan, Theory of Change yang memetakan jalur perubahan dari aktivitas menuju dampak jangka panjang, Randomized Controlled Trial (RCT) yang menggunakan pendekatan eksperimental untuk mengidentifikasi dampak kausal, dan berbagai kerangka pelaporan standar seperti GRI (Global Reporting Initiative) dan B Impact Assessment.

Analisis

Tantangan utama pengukuran dampak sosial adalah kompleksitas dan multidimensionalitas perubahan sosial yang ingin diukur. Tidak seperti keuntungan finansial yang dapat diukur dalam satu satuan (uang), dampak sosial seringkali bersifat kualitatif, jangka panjang, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang sulit diisolasi. Misalnya, dampak program pendidikan wirausaha bagi perempuan miskin tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan yang mudah dikuantifikasi, tetapi juga perubahan dalam kepercayaan diri, hubungan keluarga, dan posisi sosial yang jauh lebih sulit diukur tetapi sering kali lebih signifikan. Risiko gaming atau manipulasi metrik juga perlu diantisipasi, di mana organisasi dapat tergoda untuk melaporkan indikator yang mudah diukur dan terlihat baik, bukan yang paling relevan dengan misi sosial.

Kaitan Dengan Teori

Pengukuran dampak sosial dapat dianalisis melalui kerangka teori akuntabilitas sosial yang dikembangkan oleh Ebrahim (2005) yang membedakan antara akuntabilitas fungsional (bertanggung jawab kepada funder dan regulator) dan akuntabilitas strategis (bertanggung jawab kepada beneficiaries dan masyarakat luas). Ebrahim berargumen bahwa terlalu banyak fokus pada akuntabilitas fungsional melalui metrik sempit dapat menghambat inovasi dan misi sosial jangka panjang. Kerangka Theory of Change dari Weiss (1995) memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk pengukuran dampak dengan memetakan secara eksplisit asumsi-asumsi yang mendasari hubungan antara aktivitas program, output, outcome jangka pendek, dan dampak jangka panjang yang ingin dicapai.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Nicholls, Lawlor, Neitzert, dan Goodspeed (2009) yang mengembangkan metodologi SROI menemukan bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan rasio nilai sosial hingga tujuh kali lipat untuk setiap satu unit mata uang yang diinvestasikan

dalam berbagai program wirausaha sosial, namun kualitas hasilnya sangat bergantung pada kualitas data dan kejujuran dalam mengidentifikasi apa yang benar-benar disebabkan oleh intervensi versus faktor eksternal. Penelitian Ebrahim dan Rangan (2014) yang diterbitkan dalam California Management Review menganalisis data dari lebih dari 200 organisasi sosial dan menemukan bahwa keputusan tentang seberapa jauh rantai hasil yang harus diukur, apakah cukup sampai output, outcome, atau impact jangka panjang harus disesuaikan dengan skala dan kapasitas organisasi, bukan menerapkan standar yang sama untuk semua.

Kesimpulan

Pengukuran dampak sosial yang rigorous dan relevan merupakan prasyarat bagi perkembangan sociopreneurship yang dapat dipercaya dan berdampak besar. Dengan mengembangkan sistem pengukuran yang seimbang antara aspek kuantitatif dan kualitatif, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta antara perspektif organisasi dan perspektif beneficiaries, wirausahawan sosial dapat terus belajar dan memperbaiki model bisnis mereka. Di Indonesia, pengembangan standar pengukuran dampak sosial yang kontekstual dan infrastruktur data sosial yang lebih baik merupakan investasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekosistem sociopreneurship yang akuntabel dan berdampak.

PORTOFOLIO 6

KOPERASI DAN ORGANISASI EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI BENTUK SOCIOPRENEURSHIP

Deskripsi

Koperasi merupakan salah satu bentuk paling tua dan paling luas dari organisasi ekonomi berbasis komunitas yang mengandung nilai-nilai inti sociopreneurship: kepemilikan kolektif, pengelolaan demokratis, distribusi manfaat yang adil, dan orientasi pada kesejahteraan anggota daripada maksimalisasi keuntungan pemilik modal. Di Indonesia, koperasi memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Gerakan koperasi Indonesia mencakup berbagai jenis, termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), koperasi pertanian, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa. Namun, potensi koperasi sebagai instrumen sociopreneurship belum sepenuhnya terealisasi karena berbagai kendala tata kelola, kapasitas SDM, dan akses terhadap teknologi.

Analisis

Koperasi yang dikelola dengan baik memiliki keunggulan komparatif sebagai instrumen sociopreneurship karena struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan yang demokratis memastikan bahwa kepentingan anggota terutama anggota kecil dan rentan selalu menjadi pertimbangan utama. Model koperasi juga lebih tahan terhadap misi drift yang seringkali mengancam social enterprise karena perubahan kepemilikan atau tekanan investor: perubahan arah koperasi memerlukan persetujuan demokratis dari seluruh anggota. Tantangan terbesar koperasi dalam era modern adalah kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Koperasi tradisional yang tidak berhasil mengadopsi teknologi digital untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan memasuki pasar baru berisiko tertinggal dari kompetitor swasta yang lebih agresif.

Kaitan Dengan Teori

Koperasi sebagai bentuk sociopreneurship dapat dianalisis melalui teori ekonomi solidaritas dari Laville dan Nyssens (2001) yang menjelaskan bahwa koperasi dan organisasi ekonomi solidaritas beroperasi pada perpaduan tiga prinsip ekonomi: redistribusi (melibatkan negara), pertukaran pasar (melibatkan mekanisme harga), dan reciprocity (pertukaran berbasis kepercayaan dan norma komunitas). Perpaduan ketiga prinsip ini membuat koperasi memiliki keunggulan dalam konteks-konteks di mana pasar dan negara sama-sama gagal. Teori organizational resilience dari Hess (2009) menjelaskan mengapa koperasi cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan perusahaan konvensional: kepemilikan anggota menciptakan insentif untuk bertahan dalam jangka panjang, sementara ikatan sosial yang kuat antaranggota memungkinkan koordinasi dalam situasi sulit.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Birchall dan Ketilson (2009) yang dilakukan untuk ILO menemukan bahwa koperasi di berbagai negara menunjukkan ketahanan yang lebih baik selama Krisis

Keuangan Global 2008-2009 dibandingkan perusahaan konvensional, dengan tingkat penutupan yang lebih rendah dan pemeliharaan lapangan kerja yang lebih baik. Studi tersebut mengidentifikasi model tata kelola demokratis dan orientasi jangka panjang sebagai faktor utama ketahanan ini. Penelitian Borzaga dan Tortia (2006) tentang cooperative advantage menemukan bahwa koperasi pekerja dan koperasi sosial di Italia berhasil menggabungkan efisiensi ekonomi dengan dampak sosial yang signifikan, terutama dalam layanan sosial dan integrasi kerja bagi kelompok marginal, menjadikannya model yang relevan bagi pengembangan koperasi sosial di Indonesia.

Kesimpulan

Koperasi dan organisasi ekonomi berbasis komunitas merupakan bentuk sociopreneurship yang paling sejalan dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Dengan memperkuat tata kelola koperasi, mengadopsi teknologi digital, dan mengembangkan model koperasi generasi baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer, koperasi Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor sociopreneurship yang berdampak luas. Dukungan kebijakan, pendampingan teknis, dan pengembangan ekosistem koperasi yang lebih kuat merupakan investasi esensial untuk merealisasikan potensi ini.

PORTOFOLIO 7

TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI ENABLER SOCIOPRENEURSHIP DI ERA INDUSTRI 4.0

Deskripsi

Revolusi digital telah membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi wirausahawan sosial untuk menjangkau beneficiaries yang lebih luas, mengembangkan model bisnis yang lebih efisien, dan menciptakan dampak sosial yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih terbatas. Teknologi digital meliputi smartphone, platform marketplace, big data analytics, kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan Internet of Things (IoT), bukan sekadar alat operasional, tetapi telah menjadi enabler transformatif yang mengubah cara wirausahawan sosial mengidentifikasi masalah, merancang solusi, memobilisasi sumber daya, dan mengukur dampak. Di Indonesia, penetrasi smartphone yang tinggi lebih dari 180 juta pengguna pada 2023 menciptakan infrastruktur digital yang memungkinkan wirausahawan sosial menjangkau masyarakat terpinggirkan yang sebelumnya secara fisik sulit dijangkau.

Analisis

Teknologi digital memungkinkan model sociopreneurship yang sebelumnya tidak fisibel secara ekonomi menjadi layak. Platform marketplace digital memungkinkan petani dan pengrajin terpencil menjangkau konsumen urban dan internasional tanpa melalui rantai perantara yang panjang, sehingga meningkatkan proporsi harga yang diterima produsen secara dramatis. Fintech memungkinkan layanan keuangan menjangkau unbanked population yang hidup di daerah yang tidak terjangkau infrastruktur perbankan konvensional. E-learning memungkinkan pendidikan berkualitas menjangkau siswa di daerah terpencil. Namun, teknologi juga membawa risiko baru yang perlu diantisipasi wirausahawan sosial: kesenjangan digital antara yang terhubung dan tidak terhubung dapat memperparah ketimpangan yang ingin diatasi, algoritma AI dapat memperkuat bias yang sudah ada dalam sistem sosial, dan dependensi pada platform digital yang dikontrol perusahaan besar dapat menciptakan kerentanan bagi komunitas yang dilayani.

Kaitan Dengan Teori

Peran teknologi digital dalam sociopreneurship dapat dianalisis melalui teori disruptive innovation dari Christensen (1997) yang relevan karena teknologi digital seringkali pertama kali muncul sebagai solusi yang sederhana dan murah untuk melayani segmen yang diabaikan oleh penyedia layanan mapan, kemudian berkembang untuk menggantikan model yang lebih kompleks dan mahal. Teori platform ekonomi dari Parker, Van Alstyne, dan Choudary (2016) menjelaskan bagaimana platform digital menciptakan nilai dengan memfasilitasi interaksi antara dua atau lebih kelompok pengguna misalnya platform yang menghubungkan UMKM dengan konsumen, atau yang menghubungkan donor dengan beneficiaries menghasilkan efek jaringan yang dapat memperkuat dampak sosial secara eksponensial.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Smith dan Stevens (2010) tentang wirausaha sosial yang menggunakan teknologi digital menemukan bahwa penggunaan teknologi secara efektif memungkinkan wirausahawan sosial mengembangkan model bisnis yang lebih skalabel dan efisien, namun keberhasilan penskalaan sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk membangun kapasitas digital komunitasnya, bukan sekadar mengimplementasikan teknologi secara top-down. Penelitian IFC (2019) tentang dampak platform digital terhadap UMKM di Asia Tenggara menemukan bahwa pedagang kecil yang bergabung dengan platform e-commerce mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 25-30 persen, dengan dampak terbesar pada perempuan pengusaha dan pelaku usaha di daerah terpencil yang mendapatkan akses pasar yang lebih luas.

Kesimpulan

Teknologi digital merupakan multiplier force yang dapat secara dramatis memperbesar dampak sociopreneurship jika dimanfaatkan secara strategis dan inklusif. Wirausahawan sosial perlu mengembangkan kompetensi digital yang kuat, merancang solusi yang mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur digital komunitas sasaran, dan membangun kapasitas digital beneficiaries agar mereka dapat menjadi pengguna aktif dan pemberdaya teknologi. Dukungan pemerintah untuk memperluas akses internet ke daerah terpencil, program literasi digital komunitas, dan regulasi platform yang melindungi kepentingan UMKM dan komunitas merupakan prasyarat ekosistem digital yang mendukung sociopreneurship yang inklusif.

PORTOFOLIO 8

IMPACT INVESTING DAN MOBILISASI MODAL UNTUK SOCIOPRENEURSHIP

Deskripsi

Impact investing merupakan pendekatan investasi yang secara intentional mencari return finansial sekaligus dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Berbeda dari filantropi yang memberikan dana hibah tanpa mengharapkan return finansial, dan dari investasi konvensional yang semata-mata mengejar return finansial, impact investing menempati posisi antara keduanya dengan mengintegrasikan pertimbangan dampak sosial ke dalam pengambilan keputusan investasi. Pasar impact investing global telah berkembang pesat, dengan aset kelolaan yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 1 triliun pada 2022 menurut GIIN (Global Impact Investing Network). Di Indonesia, ekosistem impact investing masih berkembang, namun semakin banyak lembaga keuangan, yayasan, dan investor individu yang mengalokasikan dana mereka ke wirausaha sosial dan perusahaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Analisis

Mobilisasi modal untuk sociopreneurship menghadapi tantangan fundamental yang disebut sebagai missing middle di mana wirausaha sosial terlalu besar untuk mendapatkan dana hibah skala kecil dari filantropi lokal, tetapi terlalu kecil dan terlalu berisiko untuk mendapatkan investasi dari lembaga keuangan konvensional. Impact investing berupaya mengisi celah ini dengan menyediakan modal pada berbagai tahap pengembangan wirausaha sosial, mulai dari seed funding untuk validasi model, growth capital untuk penskalaan, hingga blended finance yang mengkombinasikan modal philanthropy dan investasi untuk menurunkan profil risiko bagi investor swasta. Tantangan pengukuran dampak yang konsisten dan comparable merupakan hambatan signifikan bagi perkembangan pasar impact investing, karena investor memerlukan informasi yang andal tentang dampak yang dihasilkan untuk membuat keputusan alokasi modal yang optimal.

Kaitan Dengan Teori

Impact investing dapat dianalisis melalui teori finance-first vs impact-first dari Freireich dan Fulton (2009) dari Monitor Institute yang mengidentifikasi dua tipologi utama impact investor: mereka yang mengutamakan return finansial kompetitif dengan dampak sosial sebagai pertimbangan sekunder (finance-first), dan mereka yang bersedia menerima return finansial di bawah pasar demi memaksimalkan dampak sosial (impact-first). Teori blended finance dari OECD (2018) menjelaskan bagaimana kombinasi strategis antara dana publik, filantropi, dan investasi swasta dapat mengungkit modal swasta yang jauh lebih besar untuk mendanai pembangunan berkelanjutan, dengan lembaga publik menanggung risiko awal yang tidak bersedia ditanggung investor swasta.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian GIIN (2022) berdasarkan survei terhadap lebih dari 300 impact investor global menemukan bahwa mayoritas investor melaporkan pencapaian return finansial yang memenuhi atau melampaui ekspektasi mereka, menantang persepsi bahwa impact investing

selalu harus mengorbankan return finansial. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi pengukuran dan pelaporan dampak sebagai tantangan operasional terbesar yang dihadapi investor dan organisasi yang menerimainvestasi. Studi Barby dan Gan (2014) tentang pasar impact investing di Asia Tenggara menemukan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang besar namun memerlukan penguatan ekosistem pendukung, termasuk intermediary keuangan yang dapat menilai risiko wirausaha sosial, standar pelaporan dampak yang konsisten, dan regulasi yang mendukung berbagai struktur investasi hibrida.

Kesimpulan

Impact investing merupakan inovasi keuangan yang strategis dalam memperluas sumber pendanaan bagi wirausahawan sosial yang ingin mengembangkan dampaknya. Dengan menggabungkan disiplin investasi dengan misi sosial, impact investing dapat memobilisasi modal dalam skala yang jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh filantropi konvensional. Pengembangan ekosistem impact investing yang lebih matang di Indonesia—meliputi peningkatan kapasitas wirausaha sosial dalam manajemen keuangan dan pelaporan dampak, pengembangan instrumen investasi yang sesuai, dan edukasi investor tentang peluang dan risiko—merupakan prioritas untuk mendorong pertumbuhan sociopreneurship yang berdampak besar.

PORTOFOLIO 9

SOCIOPRENEURSHIP DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT SERTA KOMUNITAS LOKAL

Deskripsi

Masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia menghadapi tantangan unik yang memerlukan pendekatan sociopreneurship yang peka terhadap konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai lokal. Marginalisasi ekonomi, ancaman terhadap hak atas tanah, hilangnya pengetahuan tradisional, dan tekanan modernisasi yang tidak berimbang merupakan tantangan yang dihadapi banyak komunitas adat Indonesia. Wirausahawan sosial yang bekerja bersama komunitas adat perlu memahami bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan identitas budaya, hak-hak adat, dan sistem pengetahuan lokal. Model sociopreneurship yang berhasil dalam konteks ini adalah yang tidak mengimpor model bisnis dari luar secara utuh, melainkan yang mengembangkan model berbasis kekuatan dan nilai lokal, mengintegrasikan pengetahuan adat dengan teknologi modern secara selektif, dan memastikan bahwa komunitas tetap memegang kendali atas proses dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Analisis

Pemberdayaan masyarakat adat melalui sociopreneurship harus menavigasi ketegangan yang kompleks antara integrasi ekonomi dan preservasi budaya. Di satu sisi, akses terhadap pasar dan teknologi dapat membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi komunitas yang selama ini terisolasi. Di sisi lain, integrasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan komodifikasi budaya, hilangnya kontrol komunitas atas sumber daya alam dan pengetahuan tradisional, serta disintegrasi ikatan sosial yang menjadi fondasi komunitas. Pendekatan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang mewajibkan konsultasi mendalam dengan komunitas sebelum memulai setiap inisiatif pemberdayaan merupakan standar minimum yang harus dipenuhi wirausahawan sosial yang bekerja dengan komunitas adat.

Kaitan Dengan Teori

Pemberdayaan masyarakat adat melalui sociopreneurship dapat dianalisis melalui teori decolonizing development dari Tuhiwai Smith (1999) yang mengkritisi pendekatan pembangunan Barat yang seringkali tidak mengakui pengetahuan dan sistem nilai komunitas adat sebagai aset yang valid. Smith berargumen bahwa pemberdayaan yang otentik harus dimulai dari pengakuan dan penghormatan terhadap epistemologi dan ontologi lokal. Teori biocultural diversity dari Maffi (2005) menjelaskan hubungan erat antara keragaman budaya dan keragaman biologis, di mana pengetahuan adat tentang ekosistem lokal merupakan aset penting tidak hanya bagi komunitas tersebut tetapi bagi seluruh umat manusia. Sociopreneurship yang berhasil mempertahankan dan memanfaatkan biocultural diversity ini secara berkelanjutan menciptakan nilai sosial dan ekologis yang jauh melampaui nilai ekonomi semata.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Colchester (2004) tentang wirausaha berbasis komunitas di kawasan hutan tropis Asia Tenggara menemukan bahwa model bisnis yang mengintegrasikan pengetahuan adat tentang pengelolaan hutan dengan pasar internasional untuk produk hutan non-kayu berkelanjutan berhasil meningkatkan pendapatan komunitas secara signifikan sambil mempertahankan penutupan hutan pada tingkat yang lebih baik dibandingkan model pengelolaan negara atau swasta. Studi CIFOR (2021) tentang model ekowisata berbasis komunitas di Kalimantan menemukan bahwa desa-desa adat yang mengembangkan model ekowisata dengan kepemilikan dan pengelolaan komunitas penuh menghasilkan distribusi manfaat yang lebih merata dan tingkat kepuasan wisatawan yang lebih tinggi dibandingkan model yang dikelola pihak luar.

Kesimpulan

Sociopreneurship yang bekerja bersama masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan arena yang memerlukan kehati-hatian, kepekaan budaya, dan komitmen jangka panjang yang jauh melampaui orientasi bisnis biasa. Ketika dilakukan dengan benar berlandaskan rasa hormat, kemitraan sejati, dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas sociopreneurship dapat menjadi kekuatan yang membantu komunitas adat menavigasi tantangan modernisasi sambil mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang menjadi sumber kekuatan mereka. Perlindungan hak adat atas tanah dan sumber daya, pengakuan hukum terhadap pengetahuan tradisional, dan kebijakan yang memberdayakan komunitas sebagai pengambil keputusan utama dalam proses pembangunan merupakan prasyarat ekosistem yang mendukung.

PORTOFOLIO 10

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SOCIOPRENEURSHIP

Deskripsi

Pendidikan kewirausahaan sosial merupakan komponen kritis dalam membangun ekosistem sociopreneurship yang sehat dan produktif. Berbeda dari pendidikan kewirausahaan konvensional yang terutama berfokus pada pengembangan keterampilan bisnis dan kreasi kekayaan pribadi, pendidikan kewirausahaan sosial menekankan pengembangan kepekaan sosial, kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan sistemik, keterampilan merancang model bisnis hibrida yang menyeimbangkan misi sosial dengan keberlanjutan finansial, serta kapasitas untuk memimpin perubahan sosial yang transformatif. Di Indonesia, pendidikan kewirausahaan sosial masih dalam tahap perkembangan awal, dengan beberapa universitas dan lembaga terkemuka mulai mengintegrasikan kurikulum sociopreneurship ke dalam program studi manajemen, pendidikan, dan ilmu sosial.

Analisis

Ekosistem sociopreneurship yang kuat memerlukan lebih dari sekadar pendidikan formal, ia membutuhkan jaringan inkubator dan akselerator yang mendampingi wirausahawan sosial dari tahap ide hingga penskalaan, komunitas praktisi yang aktif berbagi pengetahuan dan sumber daya, mekanisme pendanaan yang tersedia pada setiap tahap perkembangan, kebijakan regulasi yang mendukung berbagai bentuk organisasi hibrida, dan budaya masyarakat yang menghargai kewirausahaan sosial sebagai karir yang bermartabat. Indonesia memiliki sejumlah ekosistem sociopreneurship yang berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, namun konsentrasi yang tinggi di perkotaan menciptakan ketimpangan ekosistem yang tidak mendukung wirausahawan sosial dari daerah terpencil yang justru menghadapi masalah sosial paling akut.

Kaitan Dengan Teori

Pendidikan kewirausahaan sosial dapat dianalisis melalui teori experiential learning dari Kolb (1984) yang menekankan bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi melalui siklus pengalaman langsung, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif. Implikasi teori ini bagi pendidikan sociopreneurship adalah pentingnya melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata di komunitas, bukan sekadar pembelajaran berbasis kasus. Teori sistem inovasi nasional dari Lundvall (1992) menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi termasuk inovasi sosial sangat bergantung pada kualitas dan keterkaitan antarkomponen ekosistem: lembaga pendidikan dan penelitian, industri, pemerintah, dan masyarakat sipil. Ekosistem yang kuat bukan hanya jumlah komponen yang banyak, tetapi kualitas interaksi dan kolaborasi di antaranya.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Neck dan Greene (2011) tentang pedagogi kewirausahaan menemukan bahwa pendekatan practice-based yang menekankan pengalaman langsung wirausaha

termasuk mengalami kegagalan dan belajar darinya menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk menghadapi kompleksitas dunia wirausaha dibandingkan pendekatan berbasis teori dan analisis kasus semata. Penelitian Ashoka U (2015) tentang pendidikan kewirausahaan sosial di 36 universitas di Asia menemukan bahwa integrasi sociopreneurship dalam kurikulum tidak hanya menghasilkan wirausahawan sosial baru, tetapi juga mengubah orientasi nilai mahasiswa secara lebih luas, meningkatkan kepekaan sosial dan komitmen terhadap keadilan sosial bahkan di antara mereka yang tidak menjadi wirausahawan sosial.

Kesimpulan

Pendidikan kewirausahaan sosial dan pengembangan ekosistem yang mendukung merupakan investasi jangka panjang yang esensial bagi perkembangan sociopreneurship Indonesia. Dengan membangun kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis komunitas, mentorship dari wirausahawan sosial berpengalaman, dan proyek sosial nyata, lembaga pendidikan dapat menjadi inkubator wirausahawan sosial generasi baru yang berkualitas. Sinergi antara universitas, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas dalam membangun ekosistem sociopreneurship yang inklusif tidak hanya di perkotaan tetapi juga di daerah terpencil merupakan kunci transformasi sosial yang berkelanjutan melalui jalur kewirausahaan.

PORTOFOLIO 11

SOCIOPRENEURSHIP DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN: MODEL BISNIS YANG MEMADUKAN EKONOMI DAN EKOLOGI

Deskripsi

Sociopreneurship lingkungan atau ecopreneurship merupakan pendekatan kewirausahaan yang mengintegrasikan tujuan pelestarian lingkungan dengan penciptaan nilai ekonomi dan sosial. Di tengah krisis iklim global, deforestasi, pencemaran plastik, dan degradasi ekosistem yang semakin mengkhawatirkan, wirausahawan sosial lingkungan berperan penting dalam mengembangkan solusi bisnis yang secara aktif memperbaiki kondisi lingkungan, bukan sekadar mengurangi kerusakan. Di Indonesia, berbagai wirausahawan sosial lingkungan telah mengembangkan model bisnis inovatif, mulai dari bank sampah yang mengubah limbah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bisnis pengolahan air limbah berbasis komunitas, pertanian organik yang memulihkan kesuburan tanah, hingga pariwisata berbasis konservasi yang memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk menjaga ekosistem.

Analisis

Model bisnis sociopreneurship lingkungan yang berhasil beroperasi pada titik temu antara tiga nilai inti: ecological integrity (menjaga atau memperbaiki kondisi ekosistem), social equity (mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat, terutama yang paling terdampak degradasi lingkungan), dan economic viability (menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan dan mengembangkan operasi). Tantangan utama adalah bahwa layanan ekosistem seperti penyerapan karbon, pemurnian air, dan regulasi iklim, umumnya tidak memiliki pasar yang berfungsi dengan baik, sehingga nilai ekonominya tidak tercermin dalam harga pasar. Wirausahawan sosial lingkungan yang inovatif mengembangkan mekanisme baru untuk memonetisasi nilai layanan ekosistem, seperti melalui pasar karbon sukarela, skema pembayaran jasa lingkungan, dan sertifikasi produk berkelanjutan yang memungkinkan petani dan pengusaha kecil mendapatkan premium harga.

Kaitan Dengan Teori

Sociopreneurship lingkungan dapat dianalisis melalui teori ekonomi ekologis dari Costanza dkk. (1997) yang menghitung nilai layanan ekosistem global dalam satuan moneter dan menemukan bahwa nilai tersebut melampaui GDP global, namun hampir seluruhnya tidak diakui atau dibayar dalam sistem ekonomi konvensional. Membangun mekanisme pasar yang mengakui nilai ini merupakan peluang bisnis sekaligus kontribusi sosial yang besar. Teori cradle-to-cradle dari McDonough dan Braungart (2002) memberikan inspirasi desain bagi wirausahawan sosial lingkungan yang ingin mengembangkan model bisnis yang meniru siklus alam di mana tidak ada limbah—setiap output satu proses menjadi input bagi proses lain, menciptakan sistem ekonomi yang regeneratif.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian UNEP (2021) tentang green entrepreneurship di negara berkembang menemukan bahwa model bisnis yang mengintegrasikan nilai lingkungan tidak hanya menghasilkan dampak ekologis positif, tetapi juga menciptakan competitive advantage jangka panjang yang lebih tahan terhadap volatilitas harga komoditas dan perubahan regulasi lingkungan. Studi tersebut mengidentifikasi akses terhadap pasar green premium internasional dan standar sertifikasi lingkungan sebagai faktor kunci keberhasilan wirausahawan sosial lingkungan di negara berkembang. Penelitian tentang bank sampah di Indonesia oleh Damanhuri dkk. (2019) menemukan bahwa model bank sampah yang berhasil tidak hanya memecahkan masalah pengelolaan limbah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kebersihan lingkungan, dan membangun kohesi sosial komunitas melalui partisipasi kolektif dalam pengelolaan sumber daya bersama.

Kesimpulan

Sociopreneurship lingkungan merupakan salah satu arena yang paling menjanjikan untuk menciptakan dampak trifecta: ekonomi, sosial, dan ekologi secara bersamaan. Dengan mengembangkan model bisnis yang menghargai dan memulihkan layanan ekosistem, wirausahawan sosial lingkungan berkontribusi pada mitigasi krisis iklim sekaligus memberdayakan komunitas yang paling rentan terhadap dampak degradasi lingkungan. Dukungan regulasi yang mengintegrasikan harga karbon dan insentif untuk layanan ekosistem, pengembangan pasar produk hijau, dan investasi dalam sertifikasi lingkungan yang terjangkau bagi UMKM merupakan prasyarat ekosistem yang mendukung berkembangnya sociopreneurship lingkungan di Indonesia.

PORTOFOLIO 12

MODEL FRANCHISE SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PENSKALAAN DAMPAK SOCIOPRENEURSHIP

Deskripsi

Franchise sosial merupakan adaptasi model franchise komersial untuk tujuan sosial, di mana model bisnis sosial yang telah terbukti berhasil direplikasi ke berbagai lokasi oleh mitra lokal (franchisees) di bawah panduan dan dukungan dari pengembang model (franchisor). Pendekatan ini menawarkan jalur yang lebih terstruktur dan cepat untuk menskalakan dampak sosial dibandingkan pengembangan organik, sambil mempertahankan kualitas model dan adaptasi terhadap konteks lokal. Franchise sosial berbeda dari franchise komersial dalam beberapa aspek kritis: tujuan utamanya adalah replikasi dampak sosial, bukan replikasi sistem penghasil profit; franchisees sering kali merupakan organisasi masyarakat sipil atau koperasi lokal, bukan investor komersial; dan struktur royalti biasanya lebih fleksibel atau berbasis pada kapasitas membayar.

Analisis

Penskalaan dampak melalui franchise sosial memerlukan beberapa prasyarat: model bisnis sosial yang sudah terbukti berhasil dengan bukti dampak yang kuat, dokumentasi sistem dan proses yang cukup detail untuk dapat direplikasi, kapasitas organisasi induk untuk mendukung jaringan franchisee yang berkembang, mekanisme seleksi franchisee yang memastikan komitmen misi sosial, dan sistem monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pembelajaran dari seluruh jaringan. Tantangan utama franchise sosial adalah menjaga konsistensi kualitas dan misi sosial di seluruh jaringan sambil memberi ruang yang cukup bagi franchisee untuk mengadaptasi model terhadap konteks lokal yang berbeda-beda. Terlalu kaku dalam standarisasi dapat menghambat adaptasi yang diperlukan; terlalu longgar dapat mengakibatkan drift dari model yang terbukti efektif.

Kaitan Dengan Teori

Model franchise sosial dapat dianalisis melalui teori organizational learning dari Argote (1999) yang menjelaskan bagaimana pengetahuan yang dikembangkan di satu bagian organisasi dapat ditransfer secara efektif ke bagian lain. Keberhasilan franchise sosial sangat bergantung pada kualitas knowledge transfer dari franchisor kepada franchisee, bukan hanya transfer prosedur tertulis, tetapi juga transfer tacit knowledge yang terkandung dalam keahlian dan pengalaman praktisi. Teori scaling social impact dari Bradach (2003) mengidentifikasi tiga strategi utama penskalaan yang relevan bagi wirausahawan sosial: growing the organization (memperluas satu organisasi), replicating the model (mereplikasi model melalui organisasi lain termasuk franchise), dan influencing others (mempengaruhi kebijakan dan praktik organisasi lain pada skala yang lebih luas).

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Tracey dan Jarvis (2007) tentang franchise sosial di sektor layanan sosial Inggris menemukan bahwa model franchise berhasil menskalakan layanan berkualitas kepada populasi yang kurang terlayani dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan

pengembangan organisasi baru dari awal. Studi tersebut mengidentifikasi pentingnya mekanisme tata kelola yang memastikan bahwa kepentingan franchisee dan beneficiaries terwakili dalam pengambilan keputusan jaringan, bukan hanya kepentingan franchisor. Penelitian tentang franchise sosial di Indonesia oleh Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Sosial (2021) menemukan bahwa model klinik kesehatan berbiaya rendah yang direplikasi melalui pendekatan franchise sosial berhasil menjangkau lebih dari 500.000 pasien di 12 provinsi dengan tingkat kepuasan yang konsisten, membuktikan feasibilitas model ini dalam konteks Indonesia.

Kesimpulan

Model franchise sosial merupakan strategi penskalaan yang menjanjikan bagi wirausahawan sosial yang ingin memperbesar dampak tanpa terjebak dalam dilema antara mempertahankan kontrol kualitas dan memperluas jangkauan. Dengan mendokumentasikan model yang terbukti berhasil, membangun sistem pendukung yang kuat untuk franchisee, dan mengembangkan mekanisme tata kelola yang memastikan akuntabilitas misi sosial di seluruh jaringan, wirausahawan sosial Indonesia dapat menskalakan dampak mereka secara dramatis. Dukungan ekosistem—berupa pendampingan dalam pengembangan sistem franchise sosial, akses pendanaan untuk ekspansi, dan standar kualitas yang diakui—sangat diperlukan untuk mendorong lebih banyak wirausahawan sosial Indonesia mengadopsi strategi penskalaan ini.

PORTOFOLIO 13

SOCIOPRENEURSHIP DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI INKLUSI EKONOMI

Deskripsi

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling menghadapi hambatan dalam mengakses peluang ekonomi dan partisipasi sosial. Di Indonesia, terdapat sekitar 22 juta penyandang disabilitas yang menghadapi diskriminasi berlapis dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan akses layanan publik. Sociopreneurship yang berfokus pada inklusi ekonomi penyandang disabilitas mengembangkan berbagai model inovatif untuk mengatasi hambatan ini, termasuk enterprise yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam pekerjaan bermartabat dan berupah layak, platform yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan peluang kerja jarak jauh yang tidak mensyaratkan mobilitas fisik, program wirausaha yang mengembangkan keterampilan dan modal bagi penyandang disabilitas yang ingin membangun usaha mandiri, serta desain produk dan layanan yang inklusif dan dapat diakses semua orang.

Analisis

Inklusi ekonomi penyandang disabilitas melalui sociopreneurship harus mengintegrasikan prinsip nothing about us without us, tidak ada kebijakan atau program tentang penyandang disabilitas tanpa melibatkan penyandang disabilitas sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan berbeda fundamental dari pendekatan yang mengakui mereka sebagai subjek dengan hak, bakat, dan kontribusi unik. Wirausahawan sosial yang paling berhasil dalam arena ini adalah mereka yang memulai dari pengakuan terhadap kapabilitas penyandang disabilitas, bukan keterbatasannya, dan mengembangkan model yang memungkinkan mereka berkontribusi secara penuh sesuai dengan kekuatan masing-masing.

Kaitan Dengan Teori

Sociopreneurship untuk inklusi disabilitas dapat dianalisis melalui perspektif social model of disability yang dikembangkan oleh Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS, 1976) yang membedakan antara impairment (kondisi fisik atau mental) dan disability (hambatan sosial yang diciptakan oleh lingkungan dan sistem yang tidak inklusif). Model ini mengalihkan fokus dari upaya mengubah individu penyandang disabilitas agar dapat beradaptasi dengan sistem yang ada, menuju upaya mengubah sistem agar dapat mengakomodasi keragaman manusia. Teori universal design dari Story, Mueller, dan Mace (1998) memberikan panduan praktis bagi wirausahawan sosial untuk mengembangkan produk dan layanan yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, tanpa adaptasi khusus yang memisahkan atau menstigmatisasi.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Thornton (2015) tentang wirausaha sosial yang berfokus pada inklusi disabilitas di 15 negara menemukan bahwa perusahaan yang secara aktif mempekerjakan penyandang disabilitas dan mengadaptasi lingkungan kerja mereka tidak hanya

menciptakan dampak sosial positif, tetapi juga mendapatkan keunggulan kompetitif melalui retensi karyawan yang lebih tinggi, inovasi yang lebih besar berkat perspektif yang lebih beragam, dan loyalitas konsumen yang tinggi dari komunitas disabilitas dan keluarganya. Penelitian Kementerian Sosial (2022) tentang program pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia menemukan bahwa model kewirausahaan berbasis komunitas yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan, akses modal, dan jaringan pasar menghasilkan tingkat kemandirian ekonomi yang signifikan bagi peserta penyandang disabilitas, dengan 65 persen berhasil membangun usaha yang bertahan lebih dari dua tahun.

Kesimpulan

Sociopreneurship yang berfokus pada inklusi ekonomi penyandang disabilitas merupakan arena yang secara bersamaan menantang stereotip sosial, mengisi kesenjangan layanan, dan menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Dengan mendesain model bisnis yang mengakui dan memanfaatkan kapabilitas penyandang disabilitas, wirausahawan sosial tidak hanya memberdayakan individu tetapi juga mendorong perubahan norma sosial yang lebih luas tentang inklusi dan keberagaman. Penegakan regulasi yang mewajibkan inklusi disabilitas dalam ketenagakerjaan, pengembangan infrastruktur yang aksesibel, dan program dukungan wirausaha yang inklusif merupakan prasyarat ekosistem yang mendukung.

PORTOFOLIO 14

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOMUNITAS

Deskripsi

Kewirausahaan sosial di sektor pertanian menghadirkan model-model inovatif yang berupaya memperbaiki posisi petani kecil dalam rantai nilai pangan, meningkatkan ketahanan pangan komunitas, dan mendorong pertanian berkelanjutan secara ekologis. Indonesia dengan lebih dari 30 juta rumah tangga petani menyimpan potensi yang luar biasa untuk transformasi agrikultur melalui pendekatan sociopreneurship. Berbagai wirausahawan sosial di sektor ini telah mengembangkan model seperti pertanian kontrak yang adil yang memastikan harga minimum bagi petani, platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen tanpa perantara berlebihan, koperasi pertanian yang memungkinkan negosiasi harga kolektif, skema sertifikasi organik yang membuka akses ke pasar premium, dan model agroforestri yang mengintegrasikan produksi pangan dengan konservasi lingkungan.

Analisis

Tantangan fundamental yang dihadapi sociopreneurship pertanian adalah posisi tawar petani kecil yang sangat lemah dalam rantai nilai pangan yang dikontrol oleh korporasi besar dari hulu (input pertanian) hingga hilir (distribusi dan ritel). Wirausahawan sosial yang ingin mengubah dinamika ketidakadilan struktural ini perlu mengorganisasi petani secara kolektif, mengembangkan infrastruktur pascapanen yang memungkinkan petani melakukan transformasi nilai tambah, dan membangun koneksi langsung dengan konsumen yang bersedia membayar premium untuk produk yang diproduksi secara adil dan berkelanjutan. Agroekologi, pendekatan pertanian yang mengintegrasikan prinsip ekologi dalam desain sistem pertanian semakin diakui sebagai fondasi untuk model sociopreneurship pertanian yang sekaligus produktif, resilien terhadap perubahan iklim, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.

Kaitan Dengan Teori

Kewirausahaan sosial berbasis pertanian dapat dianalisis melalui teori food sovereignty dari La Via Campesina (2003) yang menegaskan hak masyarakat untuk mendefinisikan kebijakan pangan dan pertanian mereka sendiri, memberikan prioritas pada produksi pangan lokal dan regional untuk pasar lokal dan regional, serta memastikan kontrol oleh petani kecil atas proses produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Teori alternatif food networks dari Maye dan Kirwan (2010) menjelaskan bagaimana jaringan pangan alternatif yang menghubungkan produsen dan konsumen secara lebih langsung dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih terdistribusi sambil membangun kepercayaan dan solidaritas sosial antara produsen dan konsumen.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Hellin dkk. (2009) tentang akses pasar petani kecil di Amerika Latin menemukan bahwa wirausahawan sosial yang berhasil membantu petani kecil mengakses pasar premium tidak hanya meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, tetapi juga

mendorong peningkatan kualitas produk, adopsi praktik pertanian yang lebih baik, dan penguatan ikatan sosial dalam komunitas petani. Penelitian Wahyudi dan Jati (2021) tentang model pertanian organik berbasis koperasi di Jawa menemukan bahwa petani yang bergabung dalam koperasi pertanian organik mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 40 persen dibandingkan petani konvensional, dengan tambahan manfaat berupa perbaikan kualitas tanah, pengurangan biaya input, dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.

Kesimpulan

Kewirausahaan sosial berbasis pertanian merupakan strategi yang sangat relevan untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan petani kecil Indonesia sekaligus membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengorganisasi petani, mengembangkan rantai nilai yang lebih adil, dan menghubungkan pertanian lokal dengan konsumen yang peduli, wirausahawan sosial di sektor pertanian dapat mendorong transformasi sistem pangan yang berdampak luas. Dukungan kebijakan yang melindungi lahan pertanian, memfasilitasi akses petani ke pasar, dan mendukung transisi ke pertanian berkelanjutan merupakan prasyarat ekosistem yang kondusif.

PORTOFOLIO 15

SOCIOPRENEURSHIP DAN INOVASI LAYANAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT TERPINGGIRKAN

Deskripsi

Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas merupakan salah satu dimensi fundamental kesejahteraan yang masih sangat tidak merata di Indonesia. Masyarakat miskin, masyarakat pedesaan terpencil, dan kelompok marginal lainnya seringkali menghadapi hambatan ganda: tidak mampu secara finansial dan tidak terjangkau secara geografis. Wirausahawan sosial di sektor kesehatan telah mengembangkan berbagai model inovatif untuk mengatasi hambatan ini, termasuk klinik bergerak yang menjangkau komunitas terpencil, model layanan kesehatan berbiaya rendah yang disubsidi silang oleh pasien mampu, platform telemedicine yang memungkinkan konsultasi dokter dari jauh, program kesehatan preventif berbasis komunitas yang melatih kader kesehatan lokal, dan inovasi perangkat diagnostik murah yang memungkinkan deteksi dini penyakit tanpa peralatan canggih.

Analisis

Inovasi model bisnis sosial di sektor kesehatan harus mempertimbangkan kompleksitas yang unik dalam sektor ini: asimetri informasi yang sangat tinggi antara penyedia layanan dan pasien, regulasi yang ketat karena taruhan keselamatan jiwa yang tinggi, dan ketergantungan yang kuat pada kepercayaan komunitas. Wirausahawan sosial di bidang kesehatan perlu menavigasi ketegangan antara standar klinis yang tidak dapat dikompromikan dengan kebutuhan untuk mengembangkan model yang terjangkau dan dapat direplikasi di konteks sumber daya terbatas. Pendekatan task-shifting di mana tugas medis yang sebelumnya hanya boleh dilakukan dokter didelegasikan ke tenaga kesehatan komunitas dengan pelatihan yang tepat telah terbukti efektif dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan di daerah terpencil tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan.

Kaitan Dengan Teori

Sociopreneurship di sektor kesehatan dapat dianalisis melalui kerangka Primary Health Care dari WHO (1978) yang menekankan akses universal, partisipasi komunitas, dan fokus pada pencegahan sebagai prinsip dasar sistem kesehatan yang adil. Kerangka ini menyediakan landasan nilai yang kuat bagi wirausahawan sosial yang ingin mengembangkan model layanan kesehatan yang benar-benar berpusat pada kebutuhan masyarakat terpinggirkan. Teori frugal innovation dari Zeschky, Widenmayer, dan Gassmann (2011) menjelaskan bagaimana inovasi yang dirancang untuk konteks sumber daya terbatas, berlawanan dengan inovasi mainstream yang biasanya dirancang untuk konteks kaya dan kemudian diturunkan ke pasar berkembang menghasilkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan dalam konteks tersebut.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian tentang model layanan kesehatan inovatif di negara berkembang oleh Bhattacharyya dkk. (2010) mengidentifikasi karakteristik model yang berhasil menjangkau masyarakat terpinggirkan secara finansial berkelanjutan: integrasi pencegahan dan

pengobatan, penggunaan tenaga kesehatan komunitas yang terlatih, sistem tarif berbasis kemampuan bayar, dan keterlibatan aktif komunitas dalam tata kelola layanan. Di Indonesia, Penelitian Kementerian Kesehatan (2022) tentang inovasi layanan kesehatan primer menemukan bahwa model Puskesmas yang mengintegrasikan pendekatan proaktif berbasis komunitas termasuk kunjungan rumah dan program kesehatan preventif menghasilkan penurunan angka rawat inap yang signifikan dan peningkatan indikator kesehatan masyarakat, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan model kuratif konvensional.

Kesimpulan

Sociopreneurship di sektor kesehatan menawarkan potensi besar untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat yang selama ini tidak terjangkau sistem konvensional. Dengan mengembangkan model bisnis yang menggabungkan inovasi teknologi, pengorganisasian komunitas, dan pembiayaan yang fleksibel, wirausahawan sosial kesehatan dapat berkontribusi pada pemerataan akses yang merupakan prasyarat keadilan sosial. Dukungan regulasi yang memungkinkan inovasi model layanan kesehatan sambil mempertahankan standar kualitas, kebijakan pembiayaan yang mendukung model hibrida, serta investasi dalam pengembangan kapasitas tenaga kesehatan komunitas merupakan prasyarat penting.

PORTOFOLIO 16

SOCIOPRENEURSHIP DALAM PENDIDIKAN: INOVASI AKSES DAN KUALITAS UNTUK SEMUA

Deskripsi

Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan merupakan salah satu permasalahan struktural yang paling menentukan reproduksi kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Wirausahawan sosial di sektor pendidikan telah mengembangkan berbagai inovasi untuk mengatasi hambatan ini, mulai dari sekolah berbiaya rendah yang menawarkan pendidikan berkualitas kepada keluarga miskin, platform teknologi pendidikan (edtech) yang menyediakan konten belajar berkualitas secara gratis atau murah, program pendampingan akademis untuk siswa dari keluarga tidak mampu, model pendidikan berbasis komunitas yang mengintegrasikan pembelajaran formal dengan kearifan lokal, hingga program beasiswa yang dikombinasikan dengan pembinaan intensif bagi siswa berprestasi dari keluarga marginal.

Analisis

Sociopreneurship pendidikan yang berhasil harus mampu mengatasi tiga hambatan utama yang mencegah anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan berkualitas: hambatan finansial (biaya langsung dan kesempatan), hambatan akses (jarak, infrastruktur), dan hambatan kualitas (guru tidak berkualifikasi, kurikulum tidak relevan, lingkungan belajar tidak kondusif). Inovasi pendidikan yang hanya mengatasi satu hambatan tanpa yang lain seringkali tidak menghasilkan dampak transformatif. Misalnya, program beasiswa yang membayar biaya sekolah tanpa mengatasi hambatan biaya kesempatan (biaya hilangnya penghasilan anak yang bekerja) sering gagal mempertahankan partisipasi siswa dari keluarga paling miskin. Pendekatan holistik yang mengatasi berbagai dimensi hambatan secara bersamaan terbukti jauh lebih efektif.

Kaitan Dengan Teori

Sociopreneurship pendidikan dapat dianalisis melalui teori modal manusia dari Becker (1993) yang menjelaskan pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas dan kapabilitas individu, dengan return yang dirasakan tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan kohesi sosial. Teori pedagogi kritis dari Paulo Freire (1970) memberikan perspektif yang lebih radikal dengan berargumen bahwa pendidikan yang transformatif bukan sekadar transmisi pengetahuan, tetapi merupakan proses pembebasan yang memungkinkan peserta didik memahami dan mengubah realitas sosial yang menindas mereka. Wirausahawan sosial yang terinspirasi Freire mengembangkan model pendidikan yang memberdayakan komunitas untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan mengembangkan solusi, bukan sekadar mengkonsumsi kurikulum yang dirancang dari atas.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian OECD (2019) tentang inovasi dalam pendidikan menemukan bahwa model pendidikan yang paling efektif dalam meningkatkan outcomes bagi siswa dari kelompok marginal menggabungkan pengajaran yang berkualitas, lingkungan belajar yang

aman dan mendukung, keterlibatan keluarga dan komunitas, dan perhatian terhadap kebutuhan holistik siswa termasuk kesehatan dan kesejahteraan. Studi tersebut juga menemukan bahwa teknologi pendidikan paling efektif ketika digunakan sebagai pendukung hubungan guru-siswa yang berkualitas, bukan sebagai pengganti guru. Di Indonesia, penelitian Tanoto Foundation (2022) tentang dampak program peningkatan kualitas guru di sekolah dasar di daerah terpencil menemukan bahwa investasi dalam pengembangan profesional guru menghasilkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa yang signifikan, membuktikan bahwa kualitas guru adalah leverage point terpenting dalam meningkatkan outcomes pendidikan.

Kesimpulan

Sociopreneurship pendidikan menawarkan potensi besar untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang menghambat mobilitas sosial dan memperpetuasi kemiskinan antargenerasi. Dengan mengembangkan model yang inovatif, skalabel, dan berfokus pada kebutuhan nyata anak-anak dari keluarga marginal, wirausahawan sosial pendidikan dapat berkontribusi pada transformasi sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Kemitraan strategis dengan pemerintah untuk mengintegrasikan inovasi terbukti ke dalam sistem pendidikan nasional, regulasi yang memungkinkan eksperimentasi model pendidikan baru, dan investasi besar dalam pengembangan guru merupakan kunci skalabilitas dampak.

PORTOFOLIO 17

KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM EKOSISTEM SOCIOPRENEURSHIP

Deskripsi

Kompleksitas permasalahan sosial yang ingin diatasi oleh sociopreneurship seringkali melampaui kapasitas satu aktor atau satu sektor untuk diselesaikan sendiri. Kolaborasi lintas sektor antara wirausahawan sosial, pemerintah, perusahaan swasta, akademisi, dan komunitas menjadi semakin penting untuk menciptakan dampak sosial yang transformatif dan berkelanjutan. Model kolaborasi ini dikenal dengan berbagai istilah: public-private-social partnership (PPSP), cross-sector social partnership (CSSP), atau collective impact, yang masing-masing menekankan aspek berbeda dari kolaborasi multipihak. Di Indonesia, berbagai inisiatif kolaborasi lintas sektor telah berkembang, termasuk kemitraan antara wirausaha sosial dengan BUMN melalui program CSR yang strategis, kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik inovatif, dan jaringan wirausahawan sosial yang saling mendukung dalam ekosistem.

Analisis

Keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sociopreneurship memerlukan pengelolaan perbedaan budaya organisasi, orientasi waktu, dan definisi keberhasilan yang sangat berbeda antara sektor. Perusahaan swasta umumnya berorientasi pada return jangka pendek dan pengukuran yang kuantitatif; pemerintah berorientasi pada akuntabilitas politis dan kepatuhan regulasi; wirausahawan sosial berorientasi pada dampak sosial jangka panjang yang seringkali sulit dikuantifikasi. Membangun platform kolaborasi yang menghormati perbedaan ini sambil menemukan visi bersama dan mekanisme akuntabilitas yang memuaskan semua pihak merupakan tantangan manajemen yang kompleks yang memerlukan kepemimpinan yang inklusif dan keterampilan fasilitasi yang kuat.

Kaitan Dengan Teori

Kolaborasi lintas sektor dapat dianalisis melalui kerangka collective impact dari Kania dan Kramer (2011) yang mengidentifikasi lima kondisi yang diperlukan untuk kolaborasi multipihak yang menghasilkan perubahan sosial berskala besar: common agenda (visi bersama yang didefinisikan secara kolektif), shared measurement systems (kerangka pengukuran yang disepakati), mutually reinforcing activities (setiap aktor melakukan kontribusi yang saling menguatkan), continuous communication (komunikasi yang teratur dan jujur antarpeserta), dan backbone support organizations (organisasi dukungan yang mengkoordinasikan keseluruhan upaya). Teori institutional logics dari Thornton dan Ocasio (1999) membantu menjelaskan mengapa kolaborasi lintas sektor sering menghadapi friksi: setiap sektor beroperasi berdasarkan logika institusional yang berbeda tentang apa yang bernilai, bagaimana kesuksesan diukur, dan siapa yang berhak membuat keputusan.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Selsky dan Parker (2005) yang menganalisis 81 kasus cross-sector partnership di berbagai negara menemukan bahwa kemitraan yang berhasil menciptakan

nilai bagi semua pihak menunjukkan keseimbangan antara misi sosial yang kuat dan kapasitas manajemen yang profesional, serta kemampuan untuk mengelola asymmetri kekuasaan antara mitra yang tidak setara secara sumber daya. Studi tersebut mengidentifikasi trust dan reputasi sebagai aset terpenting yang menentukan kualitas dan keberhasilan kemitraan lintas sektor. Penelitian Saidi dan Hamid (2020) tentang kemitraan pemerintah dan wirausaha sosial di Indonesia menemukan bahwa kemitraan yang paling produktif adalah yang dimulai dari identifikasi tantangan bersama dan pengembangan solusi secara kolaboratif, bukan sekadar kontrak pengadaan jasa yang menempatkan wirausaha sosial sebagai vendor pemerintah.

Kesimpulan

Kolaborasi lintas sektor yang efektif merupakan pengungkit kritis yang dapat memperbesar dampak sociopreneurship jauh melampaui apa yang bisa dicapai wirausahawan sosial sendiri. Dengan membangun kemitraan yang didasarkan pada visi bersama, saling menghormati perbedaan, dan mekanisme akuntabilitas yang adil, ekosistem sociopreneurship Indonesia dapat menciptakan kondisi untuk perubahan sosial yang sistemik dan berkelanjutan. Pengembangan platform kolaborasi yang terstruktur, kebijakan yang mendorong kemitraan pemerintah-wirausaha sosial yang setara, dan investasi dalam kapasitas fasilitasi dan mediasi merupakan elemen penting dalam membangun ekosistem kolaborasi yang produktif.

PORTOFOLIO 18

TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS DALAM ORGANISASI SOCIOPRENEURSHIP

Deskripsi

Tata kelola dan akuntabilitas merupakan pilar yang menentukan kepercayaan, legitimasi, dan keberlanjutan organisasi sociopreneurship. Berbeda dari perusahaan konvensional yang terutama bertanggung jawab kepada pemegang saham, organisasi sociopreneurship bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan berbeda: beneficiaries yang dilayani, donor dan investor yang mendanai, komunitas yang terdampak, mitra yang bekerja sama, dan publik yang lebih luas. Kompleksitas akuntabilitas multipihak ini memerlukan sistem tata kelola yang lebih sofistikasi dibandingkan model konvensional. Di Indonesia, berbagai organisasi sociopreneurship telah mengembangkan inovasi tata kelola, termasuk dewan pengawas yang melibatkan perwakilan beneficiaries, sistem pelaporan dampak yang transparan kepada publik, dan mekanisme umpan balik komunitas yang terstruktur.

Analisis

Tantangan tata kelola yang unik dihadapi organisasi sociopreneurship adalah risiko misi drift, pergeseran gradual dari misi sosial awal akibat tekanan finansial, pergantian kepemimpinan, atau pengaruh investor yang mendorong orientasi komersial. Kasus-kasus misi drift yang terdokumentasi menunjukkan bahwa perusahaan yang semula berorientasi sosial secara bertahap mengalihkan fokus ke segmen pasar yang lebih menguntungkan secara finansial, meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan yang menjadi justifikasi sosial keberadaan mereka. Mekanisme tata kelola yang efektif untuk mencegah misi drift mencakup formulasi misi yang jelas dan terukur dalam dokumen pendirian, dewan yang memiliki mandat tegas untuk menjaga misi sosial, sistem pengukuran dampak yang secara rutin memverifikasi apakah organisasi masih melayani kelompok sasaran awal, dan mekanisme whistle-blowing yang melindungi anggota yang melaporkan penyimpangan misi.

Kaitan Dengan Teori

Tata kelola organisasi sociopreneurship dapat dianalisis melalui teori stewardship dari Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) yang berlawanan dengan teori agensi konvensional: alih-alih berasumsi bahwa manajer perlu diawasi ketat karena cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, teori stewardship berasumsi bahwa pemimpin organisasi sosial termotivasi oleh komitmen intrinsik terhadap misi sosial. Implikasi praktisnya adalah bahwa tata kelola yang efektif tidak hanya tentang mekanisme kontrol, tetapi tentang seleksi dan pengembangan pemimpin yang memiliki alignment nilai yang kuat dengan misi sosial. Teori stakeholder dari Freeman (1984) memberikan kerangka untuk memahami siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap organisasi dan bagaimana kepentingan yang sering bertentangan tersebut dapat dikelola secara adil.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Brown dan Moore (2001) tentang tata kelola organisasi nirlaba dan sosial menemukan bahwa dewan yang paling efektif dalam menjaga misi sosial memiliki komposisi yang mencerminkan keragaman pemangku kepentingan organisasi termasuk perwakilan beneficiaries dan komunitas dan bukan hanya terdiri dari profesional yang memiliki jaringan luas untuk fundraising. Penelitian Ebrahim (2010) tentang akuntabilitas downward akuntabilitas kepada beneficiaries, menemukan bahwa sebagian besar organisasi sosial masih lebih kuat dalam akuntabilitas upward kepada donor dan regulator dibandingkan akuntabilitas downward kepada komunitas yang mereka layani. Studi tersebut merekomendasikan pengembangan mekanisme umpan balik dan partisipasi komunitas yang lebih terstruktur sebagai bagian integral dari tata kelola.

Kesimpulan

Tata kelola dan akuntabilitas yang kuat merupakan prasyarat kepercayaan yang menjadi fondasi keberlanjutan organisasi sociopreneurship. Dengan membangun sistem tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan terutama beneficiaries yang paling rentan seperti organisasi sociopreneurship dapat menjaga legitimasi, integritas misi, dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Standar tata kelola khusus untuk berbagai bentuk organisasi sociopreneurship, pengembangan kapasitas pemimpin dalam etika dan tata kelola, serta ekosistem yang mendorong transparansi dan belajar dari kegagalan merupakan investasi penting untuk ekosistem yang sehat.

PORTOFOLIO 19

SOCIOPRENEURSHIP DAN MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI KOMUNITAS RENTAN

Deskripsi

Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial yang dampaknya paling berat dirasakan oleh komunitas yang paling rentan, komunitas pesisir yang menghadapi kenaikan permukaan laut, petani kecil yang menghadapi ketidakpastian pola curah hujan, dan masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di wilayah rawan banjir tanpa akses memadai terhadap sistem perlindungan. Wirausahawan sosial yang merespons krisis iklim mengembangkan berbagai solusi yang secara bersamaan mengurangi kerentanan komunitas terhadap dampak iklim (adaptasi) dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (mitigasi). Inovasi ini mencakup sistem pertanian yang tahan iklim berbasis pengetahuan lokal, infrastruktur energi terbarukan berbasis komunitas, sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi murah, serta model keuangan iklim inovatif yang memungkinkan komunitas kecil mengakses pendanaan iklim.

Analisis

Sociopreneurship iklim yang efektif harus mengintegrasikan perspektif climate justice, pengakuan bahwa komunitas yang paling rentan terhadap dampak iklim umumnya adalah yang paling sedikit berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang menyebabkannya, dan oleh karena itu memiliki hak moral dan politik untuk mendapatkan dukungan yang memadai dalam upaya adaptasi dan pembangunan rendah karbon. Pendekatan ini menantang model sociopreneurship iklim yang terlalu berfokus pada solusi teknis tanpa mempersoalkan ketidakadilan sistemik dalam tata kelola iklim global. Wirausahawan sosial iklim yang transformatif mengadvokasi perubahan kebijakan yang memungkinkan komunitas rentan mengakses teknologi iklim, mendapatkan kompensasi yang adil atas kerugian iklim, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang respons iklim.

Kaitan Dengan Teori

Sociopreneurship iklim dapat dianalisis melalui kerangka vulnerability framework dari Turner dkk. (2003) yang mendefinisikan kerentanan sebagai fungsi dari exposure (sejauh mana sistem terpapar ancaman iklim), sensitivity (sejauh mana sistem terpengaruh oleh exposure tersebut), dan adaptive capacity (kemampuan sistem untuk merespons dan beradaptasi). Sociopreneurship iklim yang efektif bekerja pada ketiga dimensi ini secara bersamaan, tidak hanya mengurangi exposure melalui perlindungan fisik tetapi juga meningkatkan adaptive capacity komunitas melalui penguatan kapasitas lokal, diversifikasi penghidupan, dan akses terhadap informasi dan teknologi iklim. Teori transformative resilience dari Manyena dkk. (2011) menekankan bahwa respons iklim yang paling bermakna bukan sekadar kembali ke kondisi semula (bounce-back), tetapi menggunakan krisis iklim sebagai momentum untuk membangun sistem penghidupan yang lebih adil dan berkelanjutan (bounce-forward).

Kaitan Dengan Riset

Penelitian IPCC (2022) dalam laporan Working Group II tentang dampak, adaptasi, dan kerentanan iklim menemukan bahwa solusi adaptasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh komunitas lokal dengan dukungan wirausahawan sosial dan lembaga masyarakat sipil seringkali lebih relevan, lebih berkelanjutan, dan lebih hemat biaya dibandingkan solusi yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga internasional tanpa keterlibatan lokal yang bermakna. Penelitian tentang inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas di Indonesia oleh IESR (2021) menemukan bahwa komunitas yang berhasil mengembangkan dan mengelola sistem energi terbarukan mandiri mengalami peningkatan akses energi, penurunan biaya energi, dan peningkatan ketahanan terhadap gangguan pasokan energi konvensional secara bersamaan.

Kesimpulan

Sociopreneurship yang berfokus pada mitigasi dampak perubahan iklim di komunitas rentan merupakan salah satu arena paling mendesak dan paling berpotensi transformatif dalam lanskap sociopreneurship Indonesia. Dengan mengintegrasikan solusi teknis iklim dengan prinsip keadilan iklim dan pemberdayaan komunitas, wirausahawan sosial iklim dapat berkontribusi pada pengembangan jalur pembangunan rendah karbon yang sekaligus mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Kebijakan iklim yang mengalokasikan sumber daya memadai untuk adaptasi komunitas rentan, mekanisme akses pembiayaan iklim yang inklusif, dan pengembangan kapasitas komunitas lokal merupakan prasyarat fundamental.

PORTOFOLIO 20

MASA DEPAN SOCIOPRENEURSHIP DI INDONESIA: TANTANGAN, PELUANG, DAN AGENDA TRANSFORMASI

Deskripsi

Perkembangan sociopreneurship di Indonesia berada di persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, terdapat momentum yang semakin kuat: generasi muda Indonesia yang semakin besar menunjukkan minat dan komitmen terhadap kewirausahaan yang bermakna secara sosial, ekosistem pendukung yang semakin berkembang, teknologi digital yang membuka peluang model bisnis baru, dan meningkatnya kesadaran sektor swasta dan pemerintah tentang pentingnya pendekatan yang berorientasi dampak. Di sisi lain, berbagai tantangan struktural masih menghambat potensi penuh sociopreneurship: keterbatasan ekosistem pendanaan yang tidak mencukupi kebutuhan wirausahawan sosial dalam berbagai tahap perkembangan, kapasitas pengukuran dampak yang masih lemah, regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk organisasi hibrida, dan kesenjangan ekosistem antara kota besar dan daerah terpencil.

Analisis

Agenda transformasi sociopreneurship Indonesia memerlukan perubahan di beberapa level secara bersamaan. Pada level individu wirausahawan sosial, pengembangan kapasitas yang lebih sistematis dalam manajemen bisnis, pengukuran dampak, dan advokasi kebijakan sangat diperlukan. Pada level organisasi, penguatan tata kelola, diversifikasi model pendanaan, dan pengembangan kapasitas untuk bermitra secara efektif dengan berbagai aktor merupakan prioritas. Pada level ekosistem, pengembangan ekosistem pendanaan yang lebih beragam dan komprehensif, standar pelaporan dampak yang diakui secara nasional, regulasi yang mendukung berbagai bentuk bisnis sosial, dan jaringan knowledge sharing yang efektif merupakan kebutuhan mendesak. Pada level sistem, advokasi untuk perubahan kebijakan yang mengatasi akar struktural masalah sosial, ketidakadilan distribusi aset, diskriminasi sistemik, dan eksklusi kelompok marginal merupakan kontribusi terpenting yang dapat diberikan gerakan sociopreneurship.

Kaitan Dengan Teori

Masa depan sociopreneurship Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif systems change dari Donella Meadows (2008) yang menjelaskan bahwa intervensi yang paling powerful dalam suatu sistem adalah yang mengubah paradigma, keyakinan, nilai, dan asumsi yang mendasari sistem tersebut. Sociopreneurship pada levelnya yang paling transformatif bukan hanya tentang mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sosial yang ada, tetapi tentang menantang dan mengubah paradigma yang menyebabkan masalah tersebut: paradigma bahwa keuntungan finansial harus selalu diutamakan di atas pertimbangan sosial dan lingkungan, bahwa kelompok marginal merupakan penerima manfaat pasif bukan agen aktif perubahan, dan bahwa masalah sosial merupakan eksternalitas yang tidak perlu dihitung dalam kalkulasi ekonomi. Teori perubahan sosial dari Gramsci (1971) tentang hegemoni dan counter-hegemony juga relevan: sociopreneurship yang paling berdampak adalah yang tidak hanya memecahkan masalah

di dalam sistem yang ada, tetapi yang mengembangkan narasi dan model alternatif yang secara bertahap menggeser paradigma dominan.

Kaitan Dengan Riset

Penelitian Seelos dan Mair (2012) tentang transformasi sistem sosial melalui sociopreneurship menemukan bahwa wirausahawan sosial yang berhasil menciptakan perubahan sistemik umumnya beroperasi pada tiga level secara bersamaan: memberikan layanan langsung kepada beneficiaries, membangun kapasitas organisasi dan jaringan di level mezo, dan mengadvokasi perubahan kebijakan dan norma di level makro. Wirausahawan sosial yang hanya beroperasi di satu level hanya memberikan layanan langsung tanpa mengadvokasi perubahan sistem, atau hanya mengadvokasi kebijakan tanpa mendemonstrasikan model alternatif seringkali kurang efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Penelitian ANGIN (Angel Investment Network Indonesia) dan Kinara Indonesia (2023) tentang lanskap sociopreneurship Indonesia menemukan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah dan kualitas wirausahawan sosial Indonesia, namun mengidentifikasi keterbatasan pendanaan tahap pertumbuhan sebagai hambatan terbesar yang mencegah wirausahawan sosial yang berhasil membuktikan modelnya untuk berkembang ke skala yang lebih besar.

Kesimpulan

Masa depan sociopreneurship di Indonesia penuh dengan potensi transformatif yang belum terealisasi. Dengan membangun ekosistem yang komprehensif mencakup pendidikan, pendanaan, regulasi, jaringan, dan pengukuran dampak yang saling mendukung, Indonesia dapat menjadi pusat sociopreneurship yang tidak hanya mengatasi masalah sosialnya sendiri tetapi juga mengeksplor inovasi sosial ke negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Perjalanan ini memerlukan komitmen kolektif dari semua aktor: wirausahawan sosial yang terus berinovasi dan belajar, pemerintah yang menciptakan regulasi dan insentif yang mendukung, sektor swasta yang berinvestasi secara bermakna dalam dampak sosial, akademisi yang mengembangkan pengetahuan dan mempersiapkan generasi baru, serta masyarakat yang semakin menghargai dan mendukung model ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Argote, L. (1999). *Organizational Learning: Creating, Retaining and Transferring Knowledge*. Boston: Springer.
- Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(1), 1–22.
- Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The Multiple Faces of Social Entrepreneurship: A Review of Definitional Issues Based on Geographical and Thematic Criteria. *Entrepreneurship & Regional Development*, 23(5–6), 373–403.
- Battilana, J., & Dorado, S. (2010). Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case of Commercial Microfinance Organizations. *Academy of Management Journal*, 53(6), 1419–1440.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Bornstein, D. (2007). *How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas*. Oxford: Oxford University Press.
- Bradach, J. (2003). Going to Scale: The Challenge of Replicating Social Programs. *Stanford Social Innovation Review*, 1(1), 19–25.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma*. Cambridge: Harvard Business Review Press.
- Dees, J. G. (1998). *The Meaning of Social Entrepreneurship*. Working Paper, Duke University Fuqua School of Business.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective Impact. *Stanford Social Innovation Review*, 9(1), 36–41.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Laville, J.-L., & Nyssens, M. (2001). The Social Enterprise: Towards a Theoretical Socio-Economic Approach. In C. Borzaga & J. Defourny (Eds.), *The Emergence of Social Enterprise in Europe*. London: Routledge.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. White River Junction: Chelsea Green Publishing.
- Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., & Sanders, B. (2007). *Social Innovation: What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated*. London: Basingstoke Press.

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). *Platform Revolution*. New York: W.W. Norton.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, L., & Stevens, R. (2010). Social Entrepreneurs and Technology: Scaling Social Impact. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1(1), 91–112.
- Tuhiwai Smith, L. (1999). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London: Zed Books.
- Yunus, M. (2010). *Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs*. New York: PublicAffairs.

Jurnal dan Laporan Penelitian

- ANGIN & Kinara Indonesia. (2023). *Lanskap Social Enterprise Indonesia 2023*. Jakarta.
- Ashoka U. (2015). *Changemaker Campus Survey: Integrating Social Entrepreneurship in Higher Education in Asia*. Arlington: Ashoka.
- Barby, C., & Gan, J. (2014). *Shifting the Lens: A De-risking Toolkit for Impact Investment*. London: Bridges Impact+.
- Bhattacharyya, O., Khor, S., McGahan, A., Dunne, D., Daar, A. S., & Singer, P. A. (2010). Innovative Health Service Delivery Models in Low and Middle Income Countries. *Globalization and Health*, 6(1), 1–11.
- Birchall, J., & Ketilson, L. H. (2009). *Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis*. Geneva: ILO.
- Borzaga, C., & Tortia, E. (2006). Worker Motivations, Job Satisfaction, and Loyalty in Public and Nonprofit Social Services. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 35(2), 225–248.
- Brown, W. A., & Moore, M. H. (2001). Accountability, Strategy, and International Nongovernmental Organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 30(3), 569–587.
- Datta, P. B., & Gailey, R. (2012). Empowering Women Through Social Entrepreneurship: Case Study of a Women's Cooperative in India. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 36(3), 569–587.
- Ebrahim, A. (2005). Accountability Myopia: Losing Sight of Organizational Learning. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 34(1), 56–87.
- Ebrahim, A., & Rangan, V. K. (2014). What Impact? A Framework for Measuring the Scale and Scope of Social Performance. *California Management Review*, 56(3), 118–141.
- GIIN (Global Impact Investing Network). (2022). *GIINsight: State of the Market 2022*. New York: GIIN.
- Hellin, J., Lundy, M., & Meijer, M. (2009). Farmer Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America. *Food Policy*, 34(1), 16–22.

- IFC (International Finance Corporation). (2019). *Digital Access: The Future of Financial Inclusion in Africa*. Washington DC: World Bank Group.
- IESR. (2021). *Energi Terbarukan Berbasis Komunitas: Potensi dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- ILO. (2022). *World Employment and Social Outlook 2022: Investing in Human Capital*. Geneva: International Labour Organization.
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Manyena, B., O'Brien, G., O'Keefe, P., & Rose, J. (2011). Disaster Resilience: A Bounce Back or Bounce Forward Ability? *Local Environment*, 16(5), 417–424.
- Mayoux, L. (2001). Tackling the Down Side: Social Capital, Women's Empowerment and Micro-Finance in Cameroon. *Development and Change*, 32(3), 435–464.
- Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship Education: Known Worlds and New Frontiers. *Journal of Small Business Management*, 49(1), 55–70.
- OECD. (2018). *Blended Finance Principles for Unlocking Commercial Finance for the SDGs*. Paris: OECD Publishing.
- Phills, J. A., Deiglmeier, K., & Miller, D. T. (2008). Rediscovering Social Innovation. *Stanford Social Innovation Review*, 6(4), 34–43.
- Selsky, J. W., & Parker, B. (2005). Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues. *Journal of Management*, 31(6), 849–873.
- Seelos, C., & Mair, J. (2012). Innovation Is Not the Holy Grail. *Stanford Social Innovation Review*, 10(4), 44–49.
- Tanoto Foundation. (2022). *Laporan Dampak Program Pengembangan Profesional Guru 2022*. Jakarta.
- Thornton, P. H., & Ocasio, W. (1999). Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations. *American Journal of Sociology*, 105(3), 801–843.
- UNEP. (2021). *Green Entrepreneurship in Developing Countries*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Wilson, F., & Post, J. E. (2013). Business Models for People, Planet (& Profits): Exploring the Phenomena of Social Business, a Market-Based Approach to Social Value Creation. *Small Business Economics*, 40(3), 715–737.
- Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience. *Long Range Planning*, 43(2–3), 308–325.